

**SURYA KEADILAN**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN : 2599-2252

Vol.2, No. 1, Mei 2018

**Wasiat kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam***Testament to adopted children according to Islamic law***Arif Kusmaja**[Kusmaja82@gmail.com](mailto:Kusmaja82@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

**Abstrak**

Penulisan karya ilmiah ini di angkat berdasarkan fenomena pelaksanaan pemberian wasiat kepada anak angkat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Masalah pokok penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan wasiat kepada anak angkat di kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau, bagaimana tinjauan pelaksanaan wasiat kepada anak angkat di kecamatan Lubuk Dalam menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian observasi (*Observational Research*) dengan mengadakan observasi, wawancara dan angket dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknisnya menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat harta kepada anak angkat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Banyaknya wasiat dalam Islam adalah sepertiga harta. Status anak angkat bukanlah seperti anak kandung. Wasiat berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Jika dimiliki ketika yang menyerahkan masih hidup maka dinamakan hibah.

**Kata Kunci:** *wasiat, anak angkat***Abstrack**

*Writing of this scientific paper in the lift based on the phenomenon of the implementation of giving testament to adopted children who are not in accordance with the provisions of Islamic law. The main issues are: how the implementation testament to the adopted child in Sub Disctrict Lubuk Dalam, how will review the implementation of the adopted child in Sub Disctrict Lubuk Dalam according to Islamic law, and whether factors will not be implemented by the Islamic law. This research is empirical or observational studies (Observational Research) by conducting observations, interviews, and quisioners. Using a qualitative approach with descriptive analysis. Technically using deductive analysis. The results showed that the implementation testament to the adopted child not in accordance with the provisions of the will of Islamic law. Many provisions of testament in Islam is the third treasure. Status of adopted children as biological children is not therefore adopted child is not entitled to inheritance like biological children. As testament be valid after the death surrender. If delivery of the thing possessed when the surrender was still alive then called a grant.*

**Keywords:** *testament, adopted child*

## PENDAHULUAN

Semenjak dahulu Pemerintah Hindia Belanda berupaya menghapuskan pemberlakuan hukum Islam yang telah hidup dalam masyarakat dan menggantinya dengan hukum adat penduduk setempat<sup>1</sup>. Perubahan dan penggantian itu pertama kali dianjurkan oleh Cornellis Van Vollenhoven (1874-1933)<sup>2</sup>. Sewaktu Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) diangkat menjadi penasehat pada pemerintahan Hindia Belanda tanggal 11 Januari 1889 untuk urusan arab dan pribumi, ia memperkuat pandangan tersebut dengan menyerang teori *Receptie in Complexu* yang dicetuskan oleh pendahulunya Lodewijk Willem Christian (L.W.C.) Van Den Berg (1845-1927)<sup>3</sup>. Menurut teori ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia"<sup>4</sup>.

Menurut Snouck Hurgronje hukum Islam baru dapat diberlakukan bila adat

telah menerimanya atau telah diresepsi. Kebijakan inilah yang kemudian dinamakan dengan *Receptie Theorie*<sup>5</sup>, yang menurut Hazairin disebut dengan "teori Iblis".

Menurut Hazairin, teori *Receptie* harus keluar atau "*Exit*" dari tatanan hukum Indonesia dengan berlakunya UUD 1945. Kemudian muncul teori *Receptie Exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Selanjutnya menurut Sajuti Thalib, teori *Receptie* dari Snouck Hurgronje itu harus dibalik<sup>6</sup>.

Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori *Receptie* yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sajuti Thalib dengan teori *Receptio A Contrario*<sup>7</sup>.

Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contratio*, menurut Ichtijanto S.A muncullah teori "*Eksistensi*". Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan

<sup>1</sup>Hajar M, *Dimensi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 34.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 35.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>4</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995). hlm. 29.

<sup>5</sup>Hajar. M, *Op. Cit.*, hlm. 37

<sup>6</sup>Sajuti Thalib, , hlm.67.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia.<sup>8</sup>

Perkembangan teori "*Receptie*" oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu terkadang masih berpengaruh pesat dalam pemikiran umat Islam di Indonesia dalam memberlakukan aturan-aturan kehidupan berdasarkan pemikiran adat yang persepsinya sudah terbentuk dalam masyarakat atau berdasarkan landasan lainnya di luar ketentuan ajaran Islam, termasuk dalam hal pengangkatan anak atau adopsi dan yang berhubungan dengannya seumpama perwalian dan kewarisan termasuk di dalamnya pemberian wasiat harta kepada anak angkatnya tersebut.

Mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai adopsi anak. Didalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, mengenai pengangkatan anak tercantum dalam pasal 171 (1): Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

pengadilan<sup>9</sup>. Pengangkatan anak dikenal dengan istilah 'Adopsi', yang dalam istilah fiqih dikenal pula istilah *Tabanni* (التبني)<sup>10</sup>.

Aturan pengangkatan anak bagi warga negara muslim juga termaktub dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terdapat pada penjelasan pasal 49 huruf a (20): Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam<sup>11</sup>.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 maret 2006, Pengadilan Agama Memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan anak angkat berdasarkan Hukum Islam<sup>12</sup>.

Setiap tindakan pasti akan menimbulkan akibat tertentu. Demikian juga dengan pengangkatan (*adopsi*) anak. Ada akibat yang harus diterima oleh anak

<sup>8</sup> H.Ichtiyanto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama, Op. Cit.*, hlm. 266.

<sup>9</sup>Inpres no.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya anda,1996), hlm. 102.

<sup>10</sup> Andi Samsu Alam, Fauzan, *Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

<sup>11</sup> Undang-Undang NO.3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

<sup>12</sup>Andi Syamsu Alam,Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 54.

maupun orang tua kandung dan orang tua angkat. Dari segi hukum, ada dua akibat yang akan berpengaruh pada kehidupan anak di masa depan yaitu mengenai perwalian dan kewarisan, termasuk mengenai hal pemberian wasiat.

Wasiat secara garis besar mempunyai pengertian yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun, manfaat untuk dimiliki oleh orang yang menerima wasiat dan dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia<sup>13</sup>.

Dasar hukum Islam dalam pemberian wasiat kepada anak angkat diambil dari firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 180, yang ditafsirkan lebih dalam mengenai makna "*Aqrabin*". Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum yang terambil dari ayat itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang ter-*hijab* atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada<sup>14</sup>. Menurut Ibnu hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak<sup>15</sup>. Selanjutnya Ibnu Hazm

menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena ter-*hijab*<sup>16</sup>.

Dalam KHI, hal-hal yang berhubungan dengan wasiat, terdapat dalam buku II, tentang kewarisan. pasal 194 – pasal 209, yang pada akhirnya tercetuslah tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam pasal 209 ayat (2): Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya<sup>17</sup>. Karena antara waris dan wasiat memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam garis besarnya wasiat mengandung pengertian yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun, manfaat untuk dimiliki oleh orang yang menerima wasiat dan dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia<sup>18</sup>.

Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdapat fenomena pelaksanaan wasiat kepada anak angkat

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakir, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), hlm. 230.

<sup>14</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Op., Cit.*, hlm. 191.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Maktabah Tijari, tth), hlm. 312-313.

<sup>17</sup> Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), hlm. 118

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakir, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 230.

yang tidak selaras dengan hukum Islam, dimana mereka memberikan wasiat harta kepada anak angkat mereka lebih dari ketentuan 1/3 bagian harta. Adapula orang tua angkat yang mewasiatkan seluruh harta kepada anak angkatnya. Bahkan ada yang mengabaikan wasiat kepada anak angkat. Adapula yang memberlakukan waris bagi anak angkat.

Ada yang membagi rata wasiat kepada anak angkat dan anak kandung tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Selain itu adapula orang tua angkat yang menyamakan kedudukan wasiat dengan hibah. Fenomena ini beranjak dari pelaksanaan wasiat yang tidak didasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam secara idelnya. Atau pemberlakuan aturan wasiat yang terjadi penyimpangan dan kekeliruan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencangkup: bagaimana pelaksanaan wasiat kepada anak angkat di Kecamatan Lubuk Dalam, bagaimana tinjauan pelaksanaan wasiat kepada anak angkat di Kecamatan Lubuk Dalam menurut hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wasiat kepada anak angkat di kecamatan Lubuk Dalam, untuk mengetahui bagaimana tinjauan

pelaksanaan wasiat kepada anak angkat di kecamatan Lubuk Dalam menurut hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian observasi (*Observational Research*)<sup>19</sup> dengan melakukan observasi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan Sifat penelitiannya diskriptif analitis. Subjek penelitian adalah orang tua angkat, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan wasiat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan mengambil tiga desa dari tujuh desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Dalam.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang memiliki anak angkat sebanyak 20 orang tua angkat per April 2015 di tiga desa dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

*Total Sampling*, memasukkan seluruh bagian populasi menjadi sampel<sup>20</sup>.

Data Primer diperoleh dari responden<sup>21</sup> dengan mengadakan wawancara beberapa masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, terutama orang tua angkat sebagai subjek utama. Data Sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok<sup>22</sup>. Pengumpulan data berupa: 1). Observasi, yaitu mengadakan pengamatan dan penelusuran langsung daerah penelitian, kemudian hasilnya dianalisis<sup>23</sup>. 2). Wawancara, yaitu penulis mendatangi langsung dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat yang memiliki anak angkat dan masyarakat sekitar yang mengetahui secara pasti fenomena keberadaan anak angkat tersebut. 3). Angket, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan kemudian diminta kesediaan

responden untuk menjawab daftar pertanyaan tersebut.

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>24</sup>. Dan teknisnya menggunakan analisa deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

## PEMBAHASAN

1. Wasiat Kepada Anak Angkat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Setelah di lakukan penelitian maka di dapatkan beberapa kategori-kategori data yang akan dianalisa dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Berwasiat lebih dari 1/3 harta.
2. Mewasiatkan seluruh harta.
3. Tidak berwasiat kepada anak angkat.
4. Menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan diberi waris.

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 61

<sup>21</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 88.

<sup>22</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 85

<sup>23</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1991), hlm. 63

5. Membagi rata wasiat kepada anak angkat dan anak kandung.
6. Menyamakan wasiat dengan hibah.
2. Wasiat Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

Pengangkatan anak dalam Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Pengangkatan anak yang sesuai dengan Islam ialah untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih *maslahat* dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 4.

Mengingat hubungan yang akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat atau hibah.

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan wasiat dan berbagai hal yang berkenaan dengan wasiat, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai istilah "Hibah", "Hibah Wasiat" dan "Wasiat" yang

berlaku dalam implementasi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam hukum Islam, mengenai peralihan harta peninggalan, selain dikenal istilah "waris" yang berarti ialah aturan-aturan tentang orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalkan seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian, dan komposisi harta warisan<sup>25</sup>, terkadang kita mendengar istilah "Hibah", "Hibah Wasiat", dan Wasiat. Agar tidak terdapat kerancuan dalam memahami tinjauan pelaksanaan wasiat, maka akan lebih baik dibahas terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut diatas secara garis besar.

Bahwa hibah dalam hukum Islam berarti: memberikan hak milik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Dan berlakunya kepemilikan harta hibah tersebut setelah penghibahan atau penyerahan<sup>26</sup>.

Sedangkan wasiat dalam hukum Islam berarti: Pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda,

---

<sup>25</sup> Hajar. M, *Hukum Kewarisan Islam "Fiqh Mawaris"*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), Cet. 1, hlm. 2.

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, (Kairo: al-Fathu Li al- 'lam al-Arabi, tth), hlm.266

utang, atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia<sup>27</sup>.

Perbedaan yang mendasar antara hibah dan wasiat adalah pada kepemilikannya setelah penyerahan. Pemilikan benda hibah dapat dimiliki setelah penghibahan atau penyerahan. Atau dalam arti lain dapat langsung dimiliki setelah penyerahan benda hibah. Akan tetapi pemilikan benda tersebut jika dimiliki setelah meninggalnya orang yang menyerahkannya, maka disebut dengan wasiat.

Hazairin mengemukakan komentarnya mengenai hibah sebagai berikut:

"Selain dari pada hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan di hadapan calon-calon ahli warisnya dan dihadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu kelak sesudah matinya diperuntukkan untuk seseorang tertentu yang sekali-kali bukan ahli warisnya. Hibah wasiat itu telah mendekati pengertian wasiat<sup>28</sup>."

Jika kata "hibah" dan "wasiat" yang ada dalam Islam digabungkan, sehingga

artinya menjadi kacau kalau kita berpegang pada asal artinya yang ada dalam hukum kewarisan Islam itu, demikian menurut Sajuti Thalib mengemukakan: Arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia ialah apa yang dimaksud wasiat dalam hukum kewarisan Islam. Berhubung dengan itu menurut Sajuti Thalib pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya-tidaknya yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam supaya ditinggalkan<sup>29</sup>.

Pemberian atau peralihan harta benda dari pemiliknya kepada orang lain yang berlaku pemilikannya tersebut setelah meninggalnya pemilik harta benda, dalam ketentuan hukum perdata BW disebut *legaat* (hibah wasiat) yang diatur dalam Hukum Waris<sup>30</sup>.

Sedangkan pengertian "wasiat" menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang isinya tentang pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah meninggal dunia, dan dapat ditarik kembali olehnya. Dalam arti lain ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelahnya ia

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 41

---

<sup>29</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 151-152.

<sup>30</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 94-95.



meninggal dunia, yaitu apa yang disebut *Testament*<sup>31</sup>.

Adapun dalam hukum adat, hukum perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum Islam memiliki persamaan dalam arti "hibah", yang dimaksud dengan hibah adalah peralihan harta seseorang yang dibagi-bagikannya pada waktu ia masih hidup untuk dimiliki yang menerima, ketika penghibah masih hidup<sup>32</sup>.

Adapun "wasiat" yang dimaksud dalam hukum Islam, dalam pengertian hukum adat yaitu apa yang disebut dengan "Hibah Wasiat", dan dalam hukum perdata BW yaitu apa yang disebut "*Legaat*".

Dari data-data penelitian yang didapat, maka fenomena pelaksanaan pemberian wasiat kepada anak-anak angkat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dapat digambarkan dalam kategori-kategori sebagai berikut:

#### 1. Berwasiat lebih Dari 1/3 Harta.

Adapun ketentuan pemberian wasiat yang diatur dalam Islam adalah maksimal pemberian 1/3 bagian harta. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits diantaranya:

<sup>31</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 51.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِيهِ؟ قَالَ : أَلْثُلُثُ , وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>33</sup>

Artinya: Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." (Muttafaq Alaihi).

Bahwa sebanyak-banyaknya pemberian wasiat adalah 1/3 harta dan tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan Rasulullah agar tidak terjadi percekcoan dan

<sup>33</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, hlm.

sengketa dalam pembagian harta warisan, apalagi hingga mengabaikan hak-hak ahli waris.

## 2. Mewasiatkan Seluruh Harta.

Mengenai ketentuan batasan 1/3 ini, Sayyid Sabiq mengatakan:

"Bagi orang yang berwasiat, apakah ia juga menjadi pewaris (orang yang mewarisi) ataupun tidak, walaupun ia seorang pewaris (yang dalam hal ini mempunyai ahli waris), maka ia tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3. Jika ia berwasiat lebih dari 1/3 bagian tersebut, maka wasiatnya tersebut tidak diizinkan kecuali dengan izin ahli waris yang lain"<sup>34</sup>.

Mengenai keadaan ini dalam beberapa hadits pun dijelaskan pula hal itu. Seperti dikatakan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي  
وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ  
يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ  
عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ  
لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ  
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ<sup>35</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu

'anhu berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak".*

Dikatakan pula dalam riwayat Muttafaq Alaih dalam kitab Bulugh al-Maram<sup>36</sup> bahwa Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata kepada Rasulullah SAW: *"Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang."* (Muttafaq Alaihi).

Ahlu Sunnah berdasarkan hadits tersebut menetapkan, bahwa berwasiat

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 290.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, hlm.

tidak boleh melebihi 1/3 dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang<sup>37</sup>.

Maka jika ada wasiat pewaris yang lebih dari 1/3 harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut:

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan.
2. Diminta kesediaan semua ahli waris yang berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan wasiat 1/3 harta tersebut, jika mereka mengikhlaskannya maka halal dan *Ibahah* hukumnya pemberian tersebut<sup>38</sup>.

Ketentuan maksimal 1/3 pembagian wasiat tersebut dalam hukum *wadh'i* dikategorikan dalam *sabab*. Hukum *sabab* yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 harta adalah ketika hal itu mengabaikan hak-hak ahli waris dan menyebabkan mudharat bagi ahli waris lainnya. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu "*Kemudaratan itu harus dihilangkan*"<sup>39</sup> dan sebagaimana

disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW "*Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan*" (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas)"<sup>40</sup>

Maka ketika pemberian yang melebihi 1/3 tersebut mendatangkan bahaya atau mudarat bagi ahli waris, hal itu dilarang. Dan pemberian yang lebih tersebut menjadi haram. Tetapi jika tidak mendatangkan mudarat, maka dengan izin ahli waris hal itu mubah. Seperti berwasiat kepada ahli waris yang ter-*hijab* atau ahli waris yang miskin dan pula mendapatkan bagian yang sedikit sesuai kadarnya dalam ketentuan waris *Furudh al-Muqodarah*.

### 3. Tidak Berwasiat Kepada Anak Angkat.

Teoritis hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib. Jumhur ulama berpendapat dalam menetapkan bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib. Dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fikih, seperti Ibnu Hazm (tokoh Mazhab al-Zahiri, Imam Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, Abu Bakar bin

<sup>37</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: 1964), Cet. 2, hlm. 31.

<sup>38</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. VIII, hlm. 110.

<sup>39</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, Cet. III, hlm. 67.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

abdul Aziz (tokoh Mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib. Dengan alasan surat al-Baqarah (2):180 menurut mereka, perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan wasiat<sup>41</sup>.

Dasar Hukum didalam pemberian wasiat kepada anak angkat diambil dari firman Allah surat al-Baqarah (2): 180, yang ditafsirkan lebih dalam mengenai makna "*Aqrabin*",

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa<sup>42</sup>.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum yang terambil dari ayat itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang ter-*hijab* atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada<sup>43</sup>. Menurut Ibnu hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib

mengeluarkan sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak<sup>44</sup>.

Selanjutnya Ibnu Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena ter-*hijab*<sup>45</sup>.

Penyataan dari Ibnu Hazm inilah yang kemudian dikembangkan menjadi konsep wasiat wajibah di Indonesia, yang disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-undang Mesir, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebutdi atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm.198.

<sup>43</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 191.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Maktabah Tijari, tth), hlm. 312-313.

dari harta warisan orang tua angkatnya<sup>46</sup>.

#### 4. Menjadikan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung Dan Diberi Waris.

Kewarisan merupakan Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara penghitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris<sup>47</sup>.

Kata yang semakna dengan *Warasa* adalah *Faraidh*, Plural atau jamak dari *Faridhah*, yang semakna dengan *Mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditetapkan<sup>48</sup>.

Dapat dipahami pula bahwa pengertian *Mafrudhah* berarti ditentukan atau diperhitungkan, yang berarti pula bahwa jumlah harta itu sudah ditentukan dan harus dilakukan secara mangikat dan memaksa<sup>49</sup>. Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh faktor hubungan darah atau kekerabatan, dan adanya hubungan perkawinan. Hubungan kerabat ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran<sup>50</sup>. Dan siapa-siapa yang berhak menerima

harta warisan sudah ditentukan secara pasti dalam surat al-Nisa' (4): 11,12,176.

Kewarisan tidak boleh disamakan dengan wasiat karena waris sudah ditentukan bagiannya secara pasti dalam kitabullah dan sunnah.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ , رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَزَادَ فِي آخِرِهِ : ( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ<sup>51</sup>

Artinya: Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas r.a dengan tambahan di akhir hadits: "Kecuali ahli waris menyetujui." Dan sanadnya hasan".

Dari hadits diatas dapatlah dipahami bahwa Allah SWT telah mewajibkan pemberian warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dalam redaksi hadits "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak" yang dimaksudkan pula sebagai

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 81

<sup>47</sup> Hajar. M, *Hukum Kewarisan Islam"Fiqh Mawaris"*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), Cet. 1, hlm. 1.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.11

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>51</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 162

para ahli waris yang telah berhak menerima waris sesuai dengan hak mereka menurut syara'. Maka tidaklah pantas jika anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkat melalui waris. Karena anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Dan kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung yang merupakan ahli waris orang tuannya. Dan tidak ada sebab syar'i untuk memberikan waris kepada anak angkat. Sebagaimana dalam Q. S Al-Ahzab (33): 5, disebutkan pula bahwa status anak angkat tidak sama seperti anak kandung;

*"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"*<sup>52</sup>.

#### 5. Membagi Rata Wasiat Kepada Anak Angkat Dan Anak Kandung.

Pembahasan pada bagian B.5 ini, memiliki titik singgung yang sama dengan pembahasan pada bagian B.4. Akan tetapi permasalahan disini ialah ahli waris yang

diberi wasiat yang sejajar dengan bukan ahli waris, yang dalam hal ini ialah anak angkat. Akan tetapi pembahasan disini, bahwa anak ahli waris yang dalam hal ini anak kandung, dapat bersama-sama anak angkat dalam menerima wasiat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan ketentuan bahwa hal itu disetujui oleh ahli waris yang lain. Salah satunya dengan mengacu pada aturan dalam redaksi hadits diatas yaitu redaksi hadits yang diriwayatkan Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas r .a dengan tambahan di akhir hadits: *"Kecuali ahli waris menyetujui."* Dan sanadnya hasan. Yang matan haditsnya berbunyi:

فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

#### 6. Menyamakan Wasiat Dengan Hibah

Secara etimologi kata *hibah* adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*<sup>53</sup>, yang berarti suatu pemberian. Sedangkan hibah secara istilah, Jumhur Ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada

<sup>52</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha putra, 1998), hlm.668-669.

<sup>53</sup> Ahmad Warson munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, cet. ke-14), hlm. 1584.

orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan<sup>54</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnah secara sederhana mengatakan bahwa hibah adalah:

عقد موضوعه تملك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض<sup>55</sup>

“sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun”.

Walaupun pengertian hibah berbeda-beda redaksi antara satu pengertian dengan yang lain, namun intinya hibah adalah sama yaitu: memberikan hak milik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Dan berlakunya kepemilikan harta hibah tersebut setelah penghibahan atau penyerahan.<sup>56</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnah mengatakan wasiat adalah:

الوصية: هبة الانسان غيره عينا اودينا اومنفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى<sup>57</sup>

“Pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, utang, atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia”.

Sedangkan menurut Hasbi Al-Shiddieqy memahami pengertian wasiat adalah bentuk *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat<sup>58</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah dipahami bahwa dalam hibah, peralihan harta kepada orang lain untuk dimiliki, berlaku ketika orang yang memberi tersebut masih hidup. Sedangkan dalam wasiat, peralihan harta tersebut untuk dimiliki, berlaku setelah orang yang memberi tersebut wafat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 point g “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari

<sup>54</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. II, hlm. 540.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 266.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, (Kairo: al-Fathu Li al- l'lam al-Arabiyy, tth), hlm.283

<sup>58</sup> T.M Hasbie Ash- Shiddieqi, *Fikih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.300.

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”<sup>59</sup>. Sebagai perbandingan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666 juga disebutkan bahwa hibah (*Schenking*) adalah “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”<sup>60</sup>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari sebagian Masyarakat yang memiliki anak angkat, ada diantara mereka yang memberikan wasiat lebih dari 1/3 bagian hartanya bahkan memberikan wasiat hampir seluruh harta kepada anak angkat sehingga terabaikan hak-hak ahli waris. Selain itu ada pula diantara orang tua angkat yang menyamakan bagian anak

angkat dengan anak kandung melalui warisan karena beralih penasaban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan ada pula masyarakat yang menyamakan bagian anak angkat dengan anak kandung melalui wasiat. Serta menganggap sama antara wasiat dan hibah.

2. Ketentuan pemberian wasiat menurut hukum Islam adalah tidak melebihi ketentuan 1/3 bagian harta terlebih lagi berwasiat dengan seluruh harta. Anak angkat tidak berhak menerima waris dari orang tua angkatnya. Menyamakan bagian anak angkat dan anak kandung melalui wasiat dibolehkan dengan pertimbangan keadilan dan disetujui ahli waris lainnya. Kepemilikan sesuatu dalam wasiat dapat dimiliki setelah wafatnya pewasiat adapun hibah dapat dimiliki setelah penyerahan hibah tersebut.

### Saran

Dari kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini maka beberapa saran yang dianggap perlu dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada para orang tua angkat, agar dapat melakukan pengangkatan anak secara legal di Pengadilan Agama dan

<sup>59</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Cet, ke-1, hlm. 156.

<sup>60</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Cet ke-25, hlm. 365.



melakukan pencatatan sipil sehubungan dengan hal-hal tersebut. Hal ini guna melindungi hak-hak anak angkat terhadap hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Juga agar memahami dan melaksanakan ketentuan waris, wasiat ataupun hibah menurut Islam, agar tercipta keadilan dalam peralihan harta nantinya.

2. Hendaknya para orang tua angkat memberikan hak berupa wasiat harta kepada anak angkatnya sesuai peruntukannya menurut ketentuan hukum Islam. Agar tercipta keadilan diantara anak angkat dan anak kandung serta ahli waris lainnya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam sehingga kita senantiasa merasakan mamfaat ilmu pengetahuan demi kemajuan.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan

penulisan jurnal ini terutama kepada: 1. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H., yang telah menyemangati penulis untuk menulis dalam jurnal ini dan kepada Dr, Ahmad Dasan, S.H., M.A., Dr. Susiyanto, S.H., Msi., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berbagi ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,: Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 132.
- Ahmad Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet.III, hlm.67-68.
- Ahmad Warson munawwir, 1997, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta , cet. ke-14, hlm. 1584.
- Al Yasa Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan penalaran Fikih Madzhab*, INIS, Jakarta, hlm. 191.
- Amir Syarifudin, 1985, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta , hlm. 252.
- Andi Samsu Alam, Fauzan, 2008, *Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 19, hlm. 54, hlm. 79, hlm. 81, hlm. 217.

- Cik Hasan Bisri, (et.al), 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, cet. Ke-2, hlm. 14.
- Hajar M, 2008, *Dimensi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Suska Press, Pekanbaru, hlm,11, 17, 34.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Kewarisan Islam"Fiqih Mawaris"*, UNRI Press, Pekanbaru, Cet. 1, hlm. 2, hlm.45.
- H.Ichtiyanto, 1985, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Dirbinperta Dep.Agama RI, Jakarta, Cet.I., hlm. 266.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta: 1964, Cet. 2, hlm. 31.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Nazar Mushtafa al-Baz, Makkah, Cet. 2.hlm. 162
- Ibnu Hazm, tth, *al-Muhalla*, Maktabah Tijari, Beirut, hlm. 312-313.
- Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151-152.
- Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 131.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 70
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 94-95.
- Sajuti Thalib, 1985, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, Cet. IV. hlm.67.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2004), Cet. VIII, hlm. 110.
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakir: Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 230, hlm. 266, hlm. 283.
- \_\_\_\_\_, tth, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, al-Fathu Li al- I'lam al-Arabiyy, Kairo, hlm.266,hlm. 284, hlm. 290.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41
- Surojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 29.
- T.M Hasbie Ash- Shiddieqi, 1997, *Fikih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm.300.